



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



**NOMOR : 37.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021
TANGGAL : 10 Mei 2021**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137
Telp. 0711 410549 Fax. 0711 358948**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Palembang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Palembang tanggal 31 Desember 2020, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 37.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 10 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 10 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Harry Purwaka, Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan, No. RNA - 77046

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No.	Uraian	Reff	2020			2019
			Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.2.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.2.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1.a	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21	832.056.845.614,28
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.1.b	33.698.550.000,00	35.526.389.909,00	105,42	47.169.725.887,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.2.1.1.c	64.863.337.447,70	64.553.337.547,79	99,52	63.549.348.856,97
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.2.1.1.d	139.981.487.000,00	144.717.347.542,20	103,38	138.338.770.510,18
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)		1.428.543.374.447,70	1.032.720.987.939,99	72,29	1.081.114.690.868,43
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.1.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.2.1.2.a				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.a.1	115.637.076.000,00	112.592.422.517,00	97,37	97.619.861.575,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.2.1.2.a.2	76.370.966.000,00	166.034.003.742,00	217,40	121.160.438.963,00
12	Dana Alokasi Umum	5.2.1.2.a.3	1.235.336.955.000,00	1.226.620.875.000,00	99,29	1.347.785.960.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.2.1.2.a.4	458.146.204.000,00	453.038.620.453,00	98,89	401.557.367.340,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)		1.885.491.201.000,00	1.958.285.921.712,00	103,86	1.968.123.627.878,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.2.1.2.b				
16	Dana Insentif Daerah	5.2.1.2.b	38.443.326.000,00	38.443.326.000,00	100,00	61.655.874.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16)		38.443.326.000,00	38.443.326.000,00	100,00	61.655.874.000,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi	5.2.1.2.c				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.c.1	336.971.798.838,00	324.430.899.999,31	96,28	613.860.738.833,11
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.2.1.2.c.2	71.971.945.329,00	0,00	0,00	91.449.906.840,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (19 s.d 20)		408.943.744.167,00	324.430.899.999,31	79,33	705.310.645.673,11
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14+17+21)		2.332.878.271.167,00	2.321.160.147.711,31	99,50	2.735.090.147.551,11
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.1.3				
24	Pendapatan Hibah	5.2.1.3.1	275.257.999.106,80	341.589.782.412,00	124,10	171.342.103.169,00
25	Pendapatan Lainnya	5.2.1.3.2	127.509.208.000,00	0,00	0,00	0,00
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		402.767.207.106,80	341.589.782.412,00	84,81	171.342.103.169,00
27	JUMLAH PENDAPATAN (7+22+26)		4.164.188.852.721,50	3.895.470.898.063,30	88,74	3.987.646.941.588,54
28						
29	BELANJA	5.2.2				
30	BELANJA OPERASI	5.2.2.1				
31	Belanja Pegawai	5.2.2.1.a	1.642.708.776.676,67	1.543.624.815.193,00	93,97	1.576.104.508.849,00
32	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.1.b	1.296.726.369.471,64	1.136.733.515.252,12	87,66	1.204.098.578.505,83
33	Belanja Subsidi	5.2.2.1.c	11.000.000.000,00	10.936.195.000,00	99,42	21.001.028.220,58
34	Belanja Hibah	5.2.2.1.d	48.288.933.000,00	29.720.787.699,05	61,55	44.336.296.614,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.2.2.1.e	0,00	0,00	0,00	2.975.000.000,00
36	JUMLAH BELANJA OPERASI (32 s.d 36)		2.998.724.079.148,31	2.721.015.313.144,17	90,74	2.848.515.412.189,41
37	BELANJA MODAL	5.2.2.2				
38	Belanja Tanah	5.2.2.2.a	897.750.000,00	197.750.000,00	22,03	9.161.308.600,00
39	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.b	237.700.271.019,00	211.615.025.318,00	89,03	171.360.546.371,07
40	Belanja Bangunan dan Gedung	5.2.2.2.c	167.395.183.757,24	148.026.931.051,55	88,43	145.956.211.832,11
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.2.d	655.238.677.293,80	491.938.591.296,00	75,08	698.327.521.362,66
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.2.e	38.819.551.991,41	34.085.822.404,08	87,81	91.104.441.133,47
43	JUMLAH BELANJA MODAL (39 s.d 43)		1.100.051.434.061,45	885.864.120.069,63	80,63	1.115.910.029.299,31
44	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.2.3				
45	Belanja Tak Terduga	5.2.2.3	109.313.945.400,00	77.939.676.666,44	71,30	581.821.993,00
46	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46)		109.313.945.400,00	77.939.676.666,44	71,30	581.821.993,00
47	JUMLAH BELANJA (36 + 42 + 46)		4.208.089.458.609,76	3.684.819.109.880,24	87,57	3.965.007.263.481,72
48	TRANSFER	5.2.2.4				
49	TRANSFER LAINNYA	5.2.2.4.1				
50	Belanja Bantuan Keuangan	5.2.2.4.1a	3.323.043.724,00	3.323.043.724,00	100,00	3.199.457.726,65
51	JUMLAH TRANSFER (50 s.d 51)		3.323.043.724,00	3.323.043.724,00	100,00	3.199.457.726,65
52	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48 + 52)	5.2.2	4.211.412.502.333,76	3.688.142.163.604,24	87,57	3.968.206.721.208,37
53						
54	SURPLUS / (DEFISIT) (28-37-44-48-52)		(47.223.649.612,26)	7.328.744.459,06	(15,52)	19.340.220.380,17

No.	Uraian	Reff	2020			2019
			Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
55						
56	PEMBIAYAAN	5.2.3				
57	PENERIMAAN DAERAH	5.2.3.1				
58	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.2.3.1a	55.323.649.612,26	55.323.649.612,26	100,00	71.427.429.232,09
59	Penerimaan Piutang Daerah	5.2.3.1b	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (56 s.d 57)		55.323.649.612,26	55.323.649.612,26	100,00	71.427.429.232,09
61	PENGELUARAN DAERAH	5.2.3.2				
62	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.3.2.a	8.100.000.000,00	6.438.000.000,00	79,48	35.444.000.000,00
63	Pembayaran Pokok Utang	5.2.3.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s.d 61)		8.100.000.000,00	6.438.000.000,00	79,48	35.444.000.000,00
65	PEMBIAYAAN NETTO (61-65)		47.223.649.612,26	48.885.649.612,26	103,62	35.983.429.232,09
66						
67	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (55+66)	5.2.4	0,00	56.214.394.071,32		55.323.649.612,26

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, 2021

Wakil Kota Palembang



H. HARNOJOYO

3. NERACA

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No	Uraian	Ref	2020	2019
1	ASET	5.1.1		
2	ASET LANCAR	5.1.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.1.1.1.a	20.724.734.372,64	26.579.822.069,47
4	Kas di Bendahara Penerima	5.1.1.1.b	0,00	7.782.600,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.1.1.c	323.183.156,00	70.219.118,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.1.1.1.d	32.770.147.649,68	23.755.439.902,69
7	Kas Lainnya	5.1.1.1.e	0,00	0,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.1.1.1.f	2.396.328.893,00	4.980.605.040,10
9	Piutang Pendapatan	5.1.1.1.g	490.205.531.788,05	394.800.918.751,05
10	Piutang Lainnya	5.1.1.1.h	1.140.115.839,39	1.145.797.089,39
11	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.1.1.1.i	(195.201.798.405,86)	(191.471.194.896,50)
12	Persediaan	5.1.1.1.j	59.630.513.500,80	48.675.816.341,90
13	Beban Dibayar Dimuka	5.1.1.1.k	267.043.076,00	216.453.368,17
14	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 13)		412.255.799.869,70	308.761.659.384,27
15	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.1.1.2		
16	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.1.1.2.a		
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.2.a	1.298.963.685.908,21	1.370.634.791.748,21
18	Investasi Permenen Lainnya	5.1.1.2.a	0,00	0,00
19	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	5.1.1.2.a	1.298.963.685.908,21	1.370.634.791.748,21
20	Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.298.963.685.908,21	1.370.634.791.748,21
21	ASET TETAP	5.1.1.3		
22	Tanah	5.1.1.3.a	6.785.961.574.197,84	5.213.918.234.430,00
23	Peralatan dan Mesin	5.1.1.3.b	1.684.532.410.962,01	1.449.293.627.422,67
24	Gedung dan Bangunan	5.1.1.3.c	2.025.333.102.089,77	1.852.424.483.736,37
25	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.1.3.d	5.161.374.380.325,60	4.717.936.977.919,96
26	Aset Tetap Lainnya	5.1.1.3.f	325.570.506.142,91	318.830.656.854,91
27	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.1.3.g	94.648.057.676,20	67.005.035.420,03
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.1.3.f	(2.414.184.127.083,48)	(2.095.733.859.552,14)
29	Jumlah Aset Tetap (22 s.d. 28)		13.663.235.904.310,85	11.523.675.156.231,80
30	ASET LAINNYA	5.1.1.4		
31	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	5.1.1.4.a	201.385.459,50	201.385.459,50
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.1.1.4.b	0,00	0,00
33	Aset Tak Berwujud	5.1.1.4.c	99.737.172.412,77	94.217.652.912,77
34	Aset Lain-lain	5.1.1.4.d	2.993.171.482.109,42	2.992.422.876.570,42
35	Akumulasi Penyusutan & Amortisasi Aset Lainnya	5.1.1.4.f	(15.909.515.770,00)	(11.542.649.757,97)
36	Jumlah Aset Lainnya (31 s.d. 35)		3.077.200.524.211,69	3.075.299.265.184,72
37	JUMLAH ASET		18.451.655.914.300,45	16.278.370.872.549,00
38	KEWAJIBAN	5.1.2		
39	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.2.1		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.2.1.a	529.852.446,00	70.219.118,00
41	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.1.2.1.b	0,00	0,00
42	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.2.1.c	10.414.029.079,71	12.320.053.648,28
43	Utang Beban	5.1.2.1.d	70.474.049.646,34	57.085.026.691,90
44	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.2.1.e	201.519.313.671,78	239.142.879.722,12
45	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (40s.d. 44)		282.937.244.843,83	308.618.179.180,30
46	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.1.2.2		
47	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
48	JUMLAH KEWAJIBAN (45+47)		282.937.244.843,83	308.618.179.180,30
49	EKUITAS	5.1.3		
50	EKUITAS		18.168.718.669.456,62	15.969.752.693.368,70
51	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (48+50)		18.451.655.914.300,45	16.278.370.872.549,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, 2021
 Walikota Palembang

H. HARNOJOYO